

MATRIKS CASCADING/ KESELARASAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
	TUJUAN 6 :					Tujuan RENSTRA																	
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	Predikat Huruf	CC	T1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP			Predikat Huruf	CC												
	Meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Pewdikat Huruf	B	S2	Tercapai Nilai LAKIP	Nilai LAKIP	Program Pemunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Nilai LAKIP	Predikat Huruf	AA												Kepala Dinas
												1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tingkat waktu pelaporan capaian kinerja	%	100	Sekretaris Dinas						
																		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Sekretaris Dinas
																		2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Sekretaris Dinas
																		3	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2	Sekretaris Dinas
																		4	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	Sekretaris Dinas
												2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pelayanan keuangan	%	100	Sekretaris Dinas						
																		1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	26	Sekretaris Dinas
																		2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Laporan	12	Sekretaris Dinas
												3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersedianya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	Sekretaris Dinas						
																		1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	Sekretaris Dinas

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
																		2	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	Sekretaris Dinas
												4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	Sekretaris Dinas						
																		1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	2	Sekretaris Dinas
																		2	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis	Orang	24	Sekretaris Dinas
												5	Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	%	100	Sekretaris Dinas						
																		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sekretaris Dinas
																		2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sekretaris Dinas
																		3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	Sekretaris Dinas
																		4.	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sekretaris Dinas
																		5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Sekretaris Dinas
																		6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	Sekretaris Dinas
																		7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Sekretaris Dinas
												6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	Sekretaris Dinas						
																		1.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	5	Sekretaris Dinas
																		2.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	2	Sekretaris Dinas

[illegible]

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
3.	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	69,85	T4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kopetensinya yang ditempatkan			%	16												
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,15	S3	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kopetensinya yang ditempatkan	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	16												Kepala Dinas
												1.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Yang Dilatih Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	Kepala UPT. Balai Latihan Kerja						
																		1.	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	48	Kepala UPT. Balai Latihan Kerja
																		2.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk PenyediaanInstruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur danPeningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	1	Kepala UPT. Balai Latihan Kerja
																		3.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	Kepala UPT. Balai Latihan Kerja
	TUJUAN 2 :																						
4.	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	69,85	T4	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan diluar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten			%	35												
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,15	S4	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan diluar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Program Penempatan Tenaga Kerja		%	35												Kepala Dinas
												1.	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Kegiatan pelayanan kepada pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja	%	100	Kepala Bidang						
																		1.	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	0	Kepala Bidang

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III												
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	
																			2.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	60	Kepala Bidang
													2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan informasi tenaga kerja	%	100	Kepala Bidang						
																			1	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah dokumen hasil Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Dokumen	1	Kepala Bidang
																			2	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	650	Kepala Bidang
																			3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	200	Kepala Bidang
	TUJUAN 2 :																							
5.	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	69,85	T4	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)			%	95													
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,15	S3	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Program Hubungan Industrial		%	95												Kepala Dinas	
													1.	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/ kota	%	100	Kepala Bidang						
																			1.	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Perusahaan	4	Kepala Bidang
																			2.	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	2	Kepala Bidang

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
																		3.	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dokumen laporan	2	Kepala Bidang
												2.	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/ kota	Terbinanya hubungan kerja dengan baik dan harmonis melalui komunikasi lembaga kerjasama bipartit	%	100	Kepala Bidang						
																		1.	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	4	Kepala Bidang
																		2.	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	4	Kepala Bidang
																		3.	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non aliansi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	2	Kepala Bidang
																		4.	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/ kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	4	Kepala Bidang
																		5.	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	10119	Kepala Bidang
	TUJUAN 6 :																						
6.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks RB	Predikat Huruf	CC	T2	Meningkatnya kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Tercapainya persentase desa berkembang			%	69												

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
	Meningkatnya kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Persentase Desa Berkembang	%	69	S2	Meningkatnya kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Tercapainya persentase desa berkembang	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Tercapainya persentase desa berkembang	%	69												Kepala Dinas
												1.	Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	Jumlah pemukiman yang dikembangkan menjadi satuan pemukiman pada tahap kemandirian	satuan pemukiman	1	Kepala Bidang						
																		1.	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah dokumen hasil Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Dokumen	1	Kepala Bidang
	TUJUAN 1 :																						
8.	Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Yang Maju dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,90	T3	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Berkelanjutan bidang industri pengolahan	LPE Kategori Industri Pengolahan			%	3,15												
	Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah Sebagai Modalitas Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,15	S1	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Berkelanjutan bidang industri pengolahan	LPE Kategori Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		%	3,15												Kepala Dinas
												1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana pembangunan industri	%	100	Kepala Bidang						
																		1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber DayaIndustri	Dokumen	1	Kepala Bidang
																		2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana danPrasarana Industri	Dokumen	1	Kepala Bidang
																		3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	Kepala Bidang
	TUJUAN 1 :																						

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
9.	Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Yang Maju dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,90	T3	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Berkelanjutan bidang industri pengolahan	Cakupan penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini			%	45												
	Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah Sebagai Modalitas Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,15	S2	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Berkelanjutan bidang industri pengolahan	Cakupan penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengelolaan Nonmigas	%	45												Kepala Dinas
												1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	100	Kepala Bidang						
																		1.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor poerindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor poerindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Kepala Bidang
	TUJUAN 1 :																						
10.	Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Yang Maju dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,90	T3	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Berkelanjutan bidang industri pengolahan	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten			%	1,09												
	Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah Sebagai Modalitas Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,15	S3	Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Berkelanjutan bidang industri pengolahan	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		%	1,09												Kepala Dinas

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
												1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	100	Kepala Bidang						
																		1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, DataKawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	Kepala Bidang
																		2.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri danPerusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	Kepala Bidang
UPT. INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN																							
	TUJUAN 1 :																						
11.	Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Yang Maju dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,90	T11	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri di Kabupaten Katingan																	
	Meningkatnya Daya Dukung dan Pertumbuhan Sektor Potensial Daerah Sebagai Modalitas Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	3,15	S11	Meningkatnya pertumbuhan /kontribusi sektor industri	LPE Kategori Industri Pengolahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		%	3,15												Kepala Dinas
												1.	Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Paket	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen						
																		1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
																		2.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket Penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
																		3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen

Perjanjian Kinerja Bupati (IKU Kabupaten)					Perjanjian Kinerja Eselon II							Perjanjian Kinerja Eselon III											
No.	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	No.	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Program	Sasaran Program	Satuan	Target 2025	No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab	No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
																		4.	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	Dokumen laporan	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
																		5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen laporan	3	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
												2.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen						
																		1	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	4	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
												3	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
																		2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
																		3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
																		4.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen
												4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen	1.	Penyediaan jaspemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jaspemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Laporan	1	Kepala UPT. Industri Rotan Hampangen

Kasongan, Januari 2025

